



Conceptual Article

Arah Baru Reformasi Pendidikan dan Implementasi dalam Proses Keberlangsungan Pendidikan Nasional di Indonesia

Muhammad Nafi'uddin,^{1*}

¹Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia.

Article Info

Received: 15 November 2022
Revised: 24 November 2022
Accepted: 10 Desember 2021
Available online: 15 Desember 2020

Keywords:

Educational Equity;
Curriculum Strengthening;
ICT;
Global Challenges.

p_2775-2682/e_2775-2690/
©2022 The Authors. Published by
Academia Publication. Ltd This is
an open access article under the
CC BY-SA license.



Abstract

This study aims to explore new directions of education reform and its implementation in strengthening the process of national education sustainability in Indonesia. This new direction of education reform includes several dimensions, namely. First, the expansion of access and equity in education; Second, curriculum strengthening; third, the use of relevant ICT in learning spaces. From this dimension, it is expected to be able to answer the demands of the times and industry needs in order to produce graduates who are ready to contribute actively in the world of work. The implementation of this new direction of education reform requires support from various parties, including the government, educational institutions, the community, and the business world. There needs to be synergy and collaboration to achieve common goals in advancing national education. In the Indonesian context, coordination between central and local governments is needed to ensure education policies are well implemented.

To Cite this article:

Nafi'uddin, M, (2022). Arah Baru Reformasi Pendidikan dan Implementasi dalam Proses Keberlangsungan Pendidikan Nasional di Indonesia. *Journal of Education and Religious Studies*, Vol. 02 No. 03 Desember 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.57060/jers.v2i03.77>

PENDAHULUAN

Mengawali tulisan ini, saya mengutip artikel yang ditulis oleh Utomo Dananjaya dengan judul "Reformasi Pendidikan". Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa pendidikan diharapkan dapat memperkuat persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan tiap warga negara mengembangkan potensi diri (Dananjaya, 2012).

Statement di atas merupakan motivasi besar bagi kehidupan pendidikan, yang mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan negara ini. Interaksi dari keduanya (pendidikan dan masyarakat), memberi peluang untuk kemajuan bangsa. Karena sering dinyatakan bahwa perkembangan suatu bangsa diprakarsai oleh nasib berkembangnya pendidikan. "Bangsa yang memiliki pendidikan yang jelek ia tidak akan maju" (SBY, Kompas 2013). Sehingga, pendidikan akan maju jika ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali orang tua (Wahjoetomo, 1997).

Meningkatnya animo masyarakat dalam mewujudkan kehidupan sosial yang dinamis ditimbulkan oleh konsep pendidikan. Meleknnya masyarakat terhadap isu MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) diprakarsai melalui pendidikan. Karena itu, pendidikan memiliki posisi strategis dalam memajukan bangsa, khususnya

¹*Corresponding Author: Dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam. (uddinafi075@gmail.com)

Indonesia yang memiliki banyak potensi alam dan budayanya. Maka tidak heran jika anggaran pendidikan diberikan porsi 20% dari APBN dan APBD (Kemendtrian Pendidikan Nasional, 2009).

Besarnya anggaran tersebut menjadikan pendidikan memiliki taring tajam dengan memberikan reformasi di dalamnya. hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan, seperti pemberian sertifikasi bagi pendidik, pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan juga pemberian BOS (bantuan Operasional Sekolah).

Dari uraian di atas, memunculkan beberapa pertanyaan, yaitu: sejauh mana reformasi pendidikan di Indonesia, Bagaimana potret pendidikan saat ini?, mampukah pendidikan Indonesia menyontoh negara-negara maju dan menyainginya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini perlu pemikiran mendalam dan semangat untuk melakukan pembaharuan serta mereformasi pendidikan, karena dimungkinkan akan mampu merekonstruksi kebijakan pendidikan yang baru dengan mempertimbangkan persoalan pendidikan yang telah lewat.

KAJIAN TEORI

Reformasi Pendidikan

Sebagaimana telah tertulis dalam UU Sisdiknas bahwa pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Kementrian Pendidikan Nasional, 2009). Dari pengertian tersebut, terdapat hiterogenitas arah dimunculkannya pendidikan itu sendiri, hal ini secara esensial menunjukkan fungsi pendidikan sangatlah penting. Dan hiterogenitas tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu; *pertama*, pendidikan didasarkan atas terbentuknya pribadi yang memiliki religiusitas yang tinggi. *Kedua*, pendidikan didasarkan atas terbentuknya sifat taat terhadap bangsa dan negara. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang baik, menjunjung tinggi warisan budaya dan serta bersatu memajukan kesejahteraan dunia.

Dari kedua hiterogenitas tersebut, maka mejadi sebuah keniscayaan bahwa pendidikan memiliki sifat inovatif, progresif dan korektif. Sehingga pendidikan akan selalu mampu menyesuaikan dengan zamannya yang selalu berkembang sampai saat ini. Lantas dimana letak reformasi pendidikan?.

Dalam KBBi diartikan bahwa, reformasi ialah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, dan atau agama dalam suatu masyarakat atau negara (Poerwadarminta, 2007). Dari pengertian ini dapat kita analisa bersama bahwa pijakan sebuah reformasi itu terletak pada keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat untuk menjadi lebih baik dengan cara menghentikan beberapa penyimpangan yang pernah ada, serta pada suatu praktek yang salah dan kemudian memperkenalkan prosedur yang lebih baik (Zainuddin, 2008). Selain itu, reformasi dilakukan atas suatu perombakan menyeluruh dari suatu system kehidupan dalam berbagai aspek, semisal dalam aspek politik, ekonomi, hokum, social dan tentunya dalam ranah pendidikan.

Akhirnya, dapat diketahui bersama bahwa reformasi pendidikan merupakan suatu jalan memperbaiki, membenarkan serta menyempurnakan sesuatu perkara yang dianggap kurang tepat dalam jalanya sistem pendidikan yang dilakukan untuk kemaslahatan pendidikan masa depan. Seperti melalui perubahan kebijakan pendidikan, intansi pendidikan dan lain-lain.

Potret Reformasi Pendidikan di Indonesia

Perlu untuk diketahui bahwa reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar, yakni terprogram, dan sistemik. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Zainuddin. Reformasi pendidikan terprogram dapat ditunjukkan dengan adanya kurikulum atau program suatu instansi pendidikan yang mengacu pada sifat inovasinya. Yakni tindakan memperkenalkan ide baru, metode baru atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan agar terjadi perubahan secara mencolok (Zainuddin, 2008). Seperti perubahan kurikulum dari berbagai tahun ke tahun menunjukkan adanya reformasi program kurikulum untuk menemukan sistem pendidikan yang tepat. Sedangkan reformasi sistemik berkaitan dengan adanya hubungan kewenangan dan distribusi serta alokasi sumber daya yang mengontrol sistem pendidikan secara keseluruhan. Hal ini sering terjadi di luar lingkungan sekolah dan berada pada kekuatan sosial dan politik, bagi penulis, melihat kondisi bangsa yang demikian, karakteristik reformasi sistemik ini sulit untuk diwujudkan karena menyangkut struktur kekuasaan, seperti halnya desentralisasi pendidikan yang simpang siur sehingga

memunculkan banyak problema, pelaksanaan ujian nasional dan bahkan pemerataan pendidikan dengan munculnya pembiayaan pendidikan yang relative sensitive di hati masyarakat.

1. Perubahan Kurikulum dan Keberlangsungan Sistem Pendidikan

Sejarah pergantian kurikulum di Indonesia telah berganti dalam kurun waktu kurang lebih perdasawarsa, meski tahun-tahun diakhir perubahan tersebut tidak sampai 10 tahun (Abdullah, 2007), yang dimulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum 2013. Pertanyaan yang muncul ialah mengapa kurikulum di Indonesia sering berganti, apakah reformasi program yang dimaksudkan di atas mengharuskan adanya perubahan secara berkesinambungan?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis meminjam analisa yang diberikan oleh Winarno Surahmat dalam buku yang berjudul "Menghindari Kurikulum yang Menjebak". Dinyatakan dalam tulisan tersebut bahwa setidaknya ada empat faktor yang berpengaruh mengapa kurikulum sering berubah, diantaranya ialah:

Pertama, Faktor yang bersumber dari birokrasi, yang memungkinkan adanya harapan dan perlakuan yang berlebihan dikalangan birokrat mengenai peran kurikulum. *Kedua, faktor yang bersumber dari penyusunan kurikulum*, terutama karena lemahnya dasar-dasar filosofis dan psikologis dalam penjabaran program kurikulum. *Ketiga, faktor yang bersumber dari pelaksana kurikulum*, yakni tingkat kompetensi dan profesionalisme guru yang kurang mendukung di kalangan para guru. *Keempat, faktor yang bersumber dari ekosistem pendidikan*, terutama karena tidak adanya dukungan sosial dan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai (Surakhmad, 2009). Keempat faktor tersebut dalam perspektif Surakhmad memiliki keterkaitan yang selalu bersinergis sebagai gabungan yang memastikan adanya kegagalan dan perubahan. Hal ini memanglah benar, karena perubahan kurikulum sebagai bagian dari reformasi pendidikan memiliki korelasi yang signifikan dengan para aktor dan birokrasi pendidikan itu sendiri.

Sudah saatnya kita mulai dapat mengadakan perubahan perspsi, konsepsi dan strategi kurikulum yang sesuai, sebagai jawaban dari empat faktor penyebab perubahan kurikulum yang berkelanjutan di atas, sebagai bahan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Perubahan perspsi, konsepsi dan strategi kurikulum tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut;

- Menempatkan guru pada titik sentral, menghargai otonominya, dan memberikan dukungan sepenuhnya yang diperlukan agar guru dapat berkarya dengan pencapaian yang optimal. Dalam kaitannya itu, menempatkan kurikulum sebagai pendamping dalam aspek-aspek yang professional, dan bukan sebagai seperangkat ketentuan yang memasang profesionalisme guru.
- Merumuskan program kurikuler dengan memperhitungkan landasan filosofis, pedagogis, psikologis sosial budaya, teknis dan politis sebagai basis kurikulum, serta memperhitungkan kondisi yang nyata dalam masyarakat dan dunia pendidikan.
- Memfasilitasi guru lebih memahami dasar-dasar pertimbangan penyusunan kurikulum baru, melibatkan guru secara aktif dalam kajian, uji coba, dan penilaian berbagai aspek kurikuler. Selanjutnya memperdayakan guru secara berkesinambungan dalam peningkatan kemampuan profesional mereka sebagai narasumber kurikulum.
- Menghidupkan dukungan dan kepedulian masyarakat terutama orang tua dan pakpihak yang berkepentingan lainnya, terhadap usaha kurikuler sekolah, serta melengkapi segala kebutuhan untuk menjamin keberhasilan dan peningkatan kualitas.

Selain empat perubahan di atas, seogyaanya diperlukan pula suatu kebijaksanaan yang dikeluarkan secara bersama untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman guru, orang tua dan *stakeholders* terhadap kurikulum pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh Surakhmad, diantara pemahaman kebijaksanaan itu ialah:

- a) Kurikulum tidak lagi diperlukan sebagai strategi reformasi yang lebih penting dari guru, yang menjadikan guru semata-mata sebagai unsur pelaksana kurikulum.
- b) Kurikulum tidak lagi satu-satunya sumber dan standar ilmu serta pengetahuan yang otoritatif, meniadakan diperlukannya sumber belajar yang sangat mungkin jauh lebih relevan.
- c) Kurikulum tidak lagi diperlukan secara baku dan universal, yang menutup kemungkinan timbulnya potensi regional dalam rangka desentralisasi pendidikan, serta dalam pengembangan program pendidikan daerah yang kontekstual.

- d) Kurikulum tidak lagi diposisikan sebagai unsur terpenting dalam menentukan kualitas, akan tetapi sebagai konsekuensi dari satu proses penyusunan strategi yang visioner, dan yang melibatkan berbagai unsur determinan.
- e) Kurikulum tidak lagi menjadi simbol masa lalu dan keterbelakangan, tetapi melambungkan komitmen perintisan serta kemajuan masa depan yang direncanakan. (Surakhmad, 2009)

2. Pembiayaan Pendidikan sebagai Penggagas Nafas Baru Pendidikan

Jejak kedua dari reformasi pendidikan ialah pada pembiayaan pendidikan, hal ini sebagaimana karakteristik yang telah penulis ulas pada tulisan sebelumnya. Memang terkesan sensitive jika kita berbicara mengenai pembiayaan pendidikan, karena permasalahan ini berhubungan erat dengan kehidupan perekonomian masyarakat. Dahulu, tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan (pendidikan formal), selain terbatasnya lembaga pendidikan, mahalnya biaya pendidikan menjadi salah satu faktor krusial terputusnya niatan untuk bersekolah. Bukti kongkrit ini bisa kita temukan pada masyarakat Indonesia era pasca kemerdekaan hingga tahun 1980-an, banyak masyarakat yang putus sekolah bahkan tidak bersekolah akibat alasan yang cukup mendasar "biaya". Pada tahun 1990-an ketika penulis masih duduk dalam bangku sekolah dasar, banyak diantara tetangga bahkan umumnya masyarakat mengeluh atas mahalnya biaya pendidikan baik swasta ataupun negeri, dan pendidikan telah diasumsikan bisa terakses bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pendidikan Indonesia telah berubah dengan mereformasi sistemnya. Wujud dari reformasi sistemik ini ialah adanya landasan hukum Undang-undang SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 yang menunjukkan bahwa pemerintah telah merencanakan dan memberikan akses seluas-luasnya terhadap masyarakat untuk bisa menyelesaikan wajib belajar. Hal ini sebagaimana redaksi UU SISDIKNAS Bab III Pasal 4.

Sebagaimana ulasan undang-undang di atas, maka dapat dilihat bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan diorientasikan terhadap kehidupan masyarakat yang utuh, adil sesuai kemauan dan harapan, serta dibangun atas dasar satu kesatuan demi menjunjung tinggi keharmonisan bersama yang diselenggarakan oleh segenap elemen masyarakat. Selain dari prinsip tersebut, undang-undang juga memberikan suatu rule yang jelas terhadap pemerintah baik pusat ataupun daerah yang memiliki kewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini sebagaimana tertera dalam pasal 11 ayat 1, pasal 11 ayat 2, dan pasal 34 ayat 2.

Wujud pembebasan pembiayaan yang diberikan pemerintah dengan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada tingkat dasar sebesar 397.000 tahun 2009 dan naik pada tahun 2015 menjadi 800.000. Pada tingkat menengah pertama pembebasan diberikan sebesar 570.000 pada tahun 2009 dan naik menjadi 1.000.000 pada tahun 2015. Adapun pada tingkat menengah atas, pembebasan biaya yang diberikan pemerintah dalam program yang sama sebesar 1.200.000 tahun 2015, hal ini ditujukan agar tercapainya pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri dengan menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Program lain yang berkaitan dengan pembebasan pendidikan, pemerintah juga telah memberikan program BSM (Bantuan Siswa Miskin) baik ditingkat dasar ataupun menengah. Hal ini memiliki efek yang cukup signifikan sehingga partisipasi masyarakat pada pendidikan mulai meningkat dengan dibuktikan nilai APK tingkat SD/SDLB/Paket A sebesar 97.31% dan APK SMP/SMPLB/Paket B sebesar 74.29%. Sedangkan dalam pembiayaan pendidikan tingkat atas atau pada perguruan tinggi pemerintah menyediakan beasiswa bagi peserta didik baik pada beasiswa prestasi ataupun beasiswa bidik misi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dengan meningkatkan anggaran pendidikan sebesar 20% pemerintah memulai memberikan nusa beda terhadap rotasi pendidikan Indonesia, karena memang pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Tercatat mulai tahun 2012 anggaran dana pendidikan telah eksis menjadi 20% dari APBN, dan pada tahun 2016 anggaran pendidikan mencapai Rp 419,2 triliun atau 20 persen dari total belanja negara Rp 2095,7 triliun. Dari total capaian tersebut, dialokasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 49,2 triliun, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp 39,5 triliun, Kementerian Agama Rp 46,8 triliun, Kementerian Negara dan lembaga lainnya Rp 10,7 triliun, dan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa mendapat kucuran sebesar Rp 267,9 triliun serta anggaran pendidikan melalui pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 5 triliun. Sehingga total capaiannya semua ialah 419.2 triliun (Anggaran, 2017).

Dengan demikian sejak pada tahun 2012 hingga tahun 2016 anggaran dana pendidikan telah mencapai 20%, dan kementerian keuangan akan berkomitmen anggaran Pendidikan dalam APBN 2017 tetap dijaga 20%

dari belanja negara, dengan fokus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang (Anggaran, 2017).

3. Muara Desentralisasi Pendidikan

Sejak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat dengan adanya UU No. 25 Tahun 1999 yang membahas tentang pertama pengaturan pemerintah daerah, kedua mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka sentralisasi yang nampak ada pada orde baru telah dirombak alias dihilangkan dari wujud aslinya, sehingga dari itu munculah kebijakan mendesentralisasikan kewenangan pusat ke daerah, termasuk dalam hal ini ialah kewenangan dalam bidang pendidikan. Dari adanya perubahan tersebut, Susetyo menyatakan bahwa secara institusional terdapat pengurangan dan juga perampingan dalam institusi pemerintah di tingkat pusat, seperti halnya penggabungan antara Kantor Depdiknas dengan Dinas P dan K Daerah menjadi Dinas (baru) di Provinsi. (Susetyo, 2005).

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari kata bahasa latin, *de* artinya lepas dan *centrum* artinya pusat (Juliantara, 2006). Jadi, jika ditinjau dari asal katanya desentralisasi berarti melepaskan dari pusat. Adapun menurut istilah KBBI desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Poerwadarminta, 2007). Sehingga dengan kata lain desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan alias otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tilaar yang dikutip oleh Huda menyampaikan bahwa desentralisasi pendidikan sebagai bagian dari otonomi daerah merupakan sebuah keharusan. Bagi dia, ada tiga aspek urgensi pelaksanaan desentralisasi tersebut yakni; a) pembangunan masyarakat demokratis, b) pengembangan *social capital*, dan, c) peningkatan daya saing bangsa (Huda, 2010). Dari itu, desentralisasi pendidikan ditujukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru.

Dari itu, guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dalam desentralisasi pendidikan, dibentuklah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka pembedayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta perbaikan manajemen di setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. MBS sendiri bertujuan untuk meningkatkan keunggulan sekolah melalui pengambilan keputusan bersama. Memberikan pelayanan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memenuhi kriteria yang sesuai dengan harapan orang tua siswa serta harapan sekolah dalam membangun keunggulan kompetitif dengan sekolah sejenis. Seperti terwujudnya penyelenggaraan sekolah dengan sistem *Full Days School*, sekolah dengan asrama sebagai sistem penunjang pembelajaran dan lain-lain.

Dengan adanya manajemen berbasis sekolah (MBS), sekolah berhak memodifikasi layanan pendidikan yang ingin dicapai sebagai wujud nyata tercapainya mutu sekolah. Mutu sekolah yang baik ialah distandarkan atas dasar pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya (masyarakat) saat ini dan masa yang akan datang, dalam konsep Islam disebut dengan istilah *kebaairunnas anfaubum linnas*.

Ranking Pendidikan Indonesia dalam Era Reformasi Pendidikan Saat Ini

Pada tahun 2015 lalu, peringkat pendidikan dunia atau *World Education Ranking* yang diterbitkan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menentukan beberapa peringkat yang diraih oleh negara-negara maju dalam segi pendidikan. Peringkat tersebut menentukan negara mana yang terbaik dari segi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. *Al-hasil* Indonesia ternyata menempati urutan ke 64 dari total 72 negara. Dengan perolehan nilai membaca 397, matematika 386, dan ilmu pengetahuan alam 403. Peringkat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam lapisan bawah meski disana masih terdapat beberapa negara yang jauh lebih tertinggal dibandingkan Indonesia.

Seperti yang dilansir oleh media Kompas, secara aplikatif, Indonesia dalam pengajaran di sekolah memiliki 1.095 jam pelajaran per-tahun. Hal ini cukup besar jika kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan hanya 903 jam per-tahun, serta Jepang yang memiliki 712 jam per-tahun (Kompas, 2016). Di negara ini, pembelajaran kelas masih banyak ditekankan pada pelajaran yang sifatnya menghafal, hal ini terbukti dari hasil survai yang dilakukan di atas bahwa siswa Indonesia jago dalam isian soal yang berkaitan dengan hafalan adapun dalam taraf menalar dan mengaplikasikannya terlampaui jauh tertinggal. Sehingga dari itu perlu digalangkan kembali pembelajaran yang bersifat kontekstual agar daya imajinasi siswa bisa menambah.

Hasil survei di atas menjadikan kebanggaan bagi kita, meski masih dalam ranking di atas 50, dari sejarahnya, Indonesia hanya mampu naik 6 tingkat sejak dari tahun 2012. Sehingga yang perlu untuk digalangan kembali ialah pengejawantahan terhadap semua aktor pendidikan bahwa pembelajaran lewat mata pelajaran bukan untuk menguasai pengetahuan, melainkan untuk membangun kompetensi. Di abad ke XXI ini literasi dasar berupa sains, matematika, membaca dan teknologi harus dikuasai selain itu kecakapan berfikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi dan karakter menjadi peran utama dibagunnya dalam peengajaran awal, agar siswa memiliki bekal untuk mengembangkannya di masa mendatang (Kompas, 2016).

Lemahnya berfikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skill*) menjadikan siswa lemah dalam menyimpulkan dan menganalisa suatu permasalahan sehingga tidak semua siswa yang tinggi hafalnya mampu memberikan analisa yang baik. Oleh karena itu, dalam reformasi pendidikan khususnya dalam ranah pengajaran, guru harus mampu merangsang siswa bertanya dan juga membuat soal, belajar dengan alat peraga, serta guru mengembangkan metode pembelajaran dan penilaian bernalar. Selain dari itu pula menghidupkan diskusi kelas dengan membiasakan anak pada buku-buku bacaan.

Arah Baru Reformasi Pendidikan di Indonesia

Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam arah baru reformasi Pendidikan

1. Pertama, perluasan akses dan kesetaraan pendidikan. Pendidikan harus diakses oleh seluruh warga negara Indonesia, tanpa pandang bulu atas latar belakang sosial dan ekonomi. Banyak anak-anak di daerah terpencil dan masyarakat yang kurang mampu yang belum menerima manfaat dari pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan bahwa akses pendidikan merata di seluruh wilayah Indonesia.
2. Kesetaraan dalam pendidikan juga perlu diperjuangkan. Tidak hanya sekadar menghadirkan kesempatan akses, tetapi juga menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan mencapai potensinya. Dalam mewujudkan kesetaraan ini, penghapusan disparitas antara kualitas pendidikan di daerah-daerah perlu menjadi fokus. Program yang mendukung pemberdayaan dan inklusi pendidikan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak berkebutuhan khusus, juga harus ditingkatkan. Ketiga, Penguatan kurikulum adalah hal penting lainnya dalam arah baru pembaharuan pendidikan. Kurikulum harus disusun agar relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan dunia industri. Dunia terus berkembang, teknologi terus maju, dan pasar kerja mengalami perubahan yang cepat. Oleh karena itu, kurikulum harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan kemampuan adaptasi yang tinggi.
3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi aspek yang penting dalam pembaharuan pendidikan. TIK dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran, memfasilitasi akses ke berbagai sumber belajar, dan memberikan ruang bagi metode pembelajaran yang inovatif. Dalam era digital seperti sekarang, integrasi TIK dalam pendidikan menjadi kunci untuk membekali generasi muda dengan kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi.

Dalam mengimplementasikan arah baru reformasi pendidikan, kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak sangatlah penting. Pemerintah sebagai regulator dan pemangku kepentingan utama dalam pendidikan perlu berperan aktif dalam menyusun kebijakan yang mendukung perubahan positif dalam sistem pendidikan. Institusi pendidikan harus memperkuat manajemen dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik agar mampu menjalankan perubahan yang diinginkan. Masyarakat perlu berperan sebagai mitra dalam proses pendidikan, mendukung lingkungan belajar yang positif, dan ikut berkontribusi dalam pengawasan dan pemantauan kualitas pendidikan. Dunia usaha juga harus terlibat aktif, baik dalam membantu merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri maupun menyediakan peluang kerja bagi lulusan pendidikan.

Arah baru reformasi pendidikan ini menjadi landasan yang krusial dalam menjawab tantangan global dan memperkuat keberlangsungan pendidikan nasional di Indonesia. Upaya bersama dalam memperluas akses dan kesetaraan pendidikan, memperkuat kurikulum yang relevan, mengintegrasikan TIK, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembaharuan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkualitas di Indonesia.

KESIMPULAN

Penulis simpulkan bahwa reformasi pendidikan di Indonesia merupakan gerakan peralihan yang harus diapresiasi, agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lain, serta mampu memberikan layanan yang sesuai dengan amanat undang-undang. Wujud reformasi tersebut dapat penulis munculkan berupa dua karakteristik besar yaitu *pertama*, reformasi program yang dapat diketahui dari perubahan kurikulum, kedua reformasi sistematis yang dapat diketahui dari adanya kebijakan terhadap pembiayaan pendidikan serta desentralisasi pendidikan.

REKOMENDASI

Artikel konseptual ini merupakan bentuk pemikiran yang sangat terbatas, sehingga perlu kajian yang lebih mendalam dengan dilakukan penelitian kebijakan yang terukur yang mengkaji beberapa kebijakanyang sudah berjalan dan memberikan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Penulis yakin dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan dan celah, sehingga penulis berharap adanya kajian lanjutan tentang sejarah reformasi pendidikan sebagai upaya untuk memajukan Pendidikan di Indonesia.

ACKNOWLEDGEMENT

Naskah akademik ini sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya antara lain sudah diseminarkan dan berbentuk makalah di forum ilmiah, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada kolega yang turut berpartisipasi dalam seminar.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. (2007). Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah; Suatu Tinjauan Kritis Filosofis. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 13(66).
- Anggaran, D. J. (2017). *Informasi APBN 2017: APBN yang lebih kredibel dan berkualitas di tengah ketidakpastian global*. (D. P. APBN, Ed.). Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Dananjaya, U. (2012). Reformasi Pendidikan. *KOMPAS*.
- Huda, M. (2010). *Kajian Filosofis Otonomi Daerah Bidang Pendidikan* (1st ed.). Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Juliantara, D. (2006). *Desentralisasi Kerakyatan Gagasan Dan Praktis* (I). Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Kompas, (2016). *Daya Imajinasi Siswa Lemah*. Jakarta: Kompas.
- Nasional, K. P. Sistem Pendidikan Nasional (2009). Bandung.
- Nasional, K. P. Undang-Undang Guru dan Dosen (2009). Bandung.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ketiga). Balai Pustaka.
- Surakhmad, W. (2009). *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*. (S. Sularto, Ed.) (Pertama). Jakarta: Kompas.
- Susetyo, B. (2005). *Politik Pendidikan Penguasa* (I). Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Wahjoetomo. (1997). *Perguruan Tinggi Pesantren; Pendidikan Alternatif Masa Depan* (1st ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Zainuddin, M. (2008). *Reformasi Pendidikan; Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah* (Pertama). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.